



TIDAK LAGI BERBASIS SKALA KAWASAN Penataan Kawasan Kumuh Sepenuhnya Gunakan APBD

YOGYA (KR) - Penataan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogya pada tahun ini sepenuhnya akan mengandalkan APBD. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan alokasi bantuan dari Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, menjelaskan kegiatan penanganan kawasan kumuh pada tahun ini hanya difokuskan pada tiga lokasi yakni Klitren, Pakuncen, dan Prawirodirjan. "Semuanya menggunakan APBD Kota Yogya. Tidak ada alokasi anggaran dari DIY maupun dari pusat," jelasnya, Senin (16/1).

Di samping itu, fokus penanganan juga tidak lagi berbasis skala kawasan dengan cakupan yang luas. Prioritas pada tahun ini justru lebih menuntaskan indikator kumuh yang ada di kawasan tersebut. Total ada tujuh indikator kumuh yang menjadi acuan. Di antaranya me-

nyangkut kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, sistem air bersih, sanitasi hingga proteksi kebakaran.

Sigit memaparkan, masing-masing kawasan kumuh memiliki indikator yang berbeda-beda. Oleh karena itu pihaknya akan menuntaskan indikator yang masih tinggi di suatu kawasan. Seperti di Klitren yang akan fokus pada penataan sanitasi dengan total alokasi Rp 1 miliar. Penanganan di Klitren sudah dilakukan sejak tahun lalu, terlebih masyarakat di kawasan tersebut sudah memundurkan rumah dari tepi Kali Belik untuk mendukung penataan sanitasi. "Kalau nanti sanitasi sudah bisa tertangani maka skornya akan semakin bagus," tandasnya.

Sedangkan di Pakuncen, penataan dilakukan untuk melanjutkan paket penataan kawasan kumuh yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat pada 2021. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 900 juta. Konsep penataannya dilakukan dengan membangun jalan lingkungan

sehingga nantinya terhubung dengan Tegalrejo. Sementara penataan di Prawirodirjan dilakukan guna mengembalikan fungsi lahan untuk kepentingan publik dengan membangun ruang terbuka hijau. Anggarannya juga mencapai Rp 900 juta.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya Ririk Banowati, mengatakan Pemkot Yogya memiliki target untuk mampu menangani kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota seluas tiga hektare. Dirinya turut mendukung pola penanganan dengan menurunkan nilai indikator kumuh agar kawasan tersebut tidak lagi masuk kategori kumuh.

Kendati demikian pihaknya akan tetap mengupayakan ada kolaborasi dengan Pemda DIY maupun Pusat. Terutama terhadap kawasan kumuh yang sesuai kewenangan masuk penanganan provinsi dan pusat. "Tetapi yang skala kawasan seperti di Umbulharjo, Mantrijeron serta Tegalrejo, kami usulkan ke kementerian untuk penanganannya," katanya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005